

**STRATEGI PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
DALAM RANGKA MENANGKAL ANCAMAN NIRMILITER
(STUDI DI KABUPATEN BEKASI, PERIODE 2016-2020)**

**THE STRATEGY OF STATE-DEFENCE AWARENESS DEVELOPMENT
IN PREVENTING NON-MILITARY THREAT
(A STUDY IN THE BEKASI REGENCY, 2016-2020 PERIOD)**

Tahan Samuel Lumban Toruan, Deni Dadang Ahmad R, dan Henny Widyastuti

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
(tahan.toruan@idu.ac.id, denidar@ymail.com, dan hendyastisa@gmail.com)

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis setiap kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan dalam pembinaan sikap Bela Negara masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi dalam menangkal ancaman nirmiliter. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi kasus dan kualitatif, serta CIPP (context, input, process, product) digunakan sebagai model evaluasi. Subjek penelitian ini adalah para pihak yang dapat memberikan data sesuai kebutuhan peneliti dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Objek penelitian ini adalah masalah kesadaran bela negara dan strategi pembinaan kesadaran bela negara masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara tidak dilakukan secara periodik oleh satuan wilayah teritorial. Hal tersebut terjadi karena kegiatan pembinaan kesadaran bela negara belum menjadi prioritas serta belum adanya strategi pembinaan kesadaran bela negara.

Kata Kunci : ancaman, bela negara, evaluasi, kesadaran bela negara, strategi

Abstract – The purpose of this research is to analyze constraints being faced and the strategy used in the development of the State Defense attitude of the community in Bekasi Regency in warding off non-military threats. The approach used was a case study and qualitative approach, and CIPP (context, input, process, product) was used as an evaluation model. The subjects in this study were the parties who could provide the data according to the needs of the researcher by using purposive sampling technique. The object of this research is the problem of state defense awareness and strategies for fostering state defense awareness in the Bekasi Regency area. The data gathering was carried out through interviews, observation, and literature study. The results showed that the activities of developing State Defense awareness were not carried out periodically by territorial units. This happens because the activities of developing awareness of state defense have not become a priority and the absence of a strategy for fostering awareness of state defense.

Keywords: evaluation, state defense, state defence awareness, strategy, threats

Pendahuluan

Kabupaten Bekasi ditinjau dari kondisi geografis adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia sehingga Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah penyangga ibukota negara Indonesia. Sebagai wilayah penyangga ibukota negara, Kabupaten Bekasi memiliki nilai strategis baik dari segi politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan, pertahanan maupun keamanan. Wilayah Kabupaten Bekasi berada dalam luas 127.388 ha terdiri dari 23 Kecamatan dengan jumlah penduduk 3.500.023 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020).

Banyaknya kejadian-kejadian kehidupan sosial di Kabupaten Bekasi dikarenakan padatnya penduduk wilayah tersebut serta berbatasan dengan DKI Jakarta, memunculkan berbagai masalah seperti kejahatan, serta rentannya persatuan bangsa dan rendahnya rasa kepedulian.

Misalnya di wilayah Kabupaten Bekasi, angka kriminalitas cenderung meningkat setiap tahunnya. Informasi yang diperoleh dari Polres Metro Bekasi (2019), bahwa terjadi peningkatan kasus kejahatan sepanjang tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yaitu sebanyak 1.015 kasus kejahatan pada tahun 2019 dibandingkan 999 kasus kejahatan pada tahun 2018.

Mengingat wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan lokasi industri di mana banyak karyawan atau pekerjanya seringkali menjadi sasaran dijadikan peserta aksi unjuk rasa yang anarkhis jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada buruh. Peserta aksi unjuk rasa dari wilayah Bekasi ke Jakarta terlihat sangat menonjol baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Peserta aksi unjuk rasa yang di bawah umur juga paling banyak berasal dari wilayah Kabupaten Bekasi. Kasus kejahatan lainnya yang juga menarik perhatian adalah banyaknya terduga anggota kelompok teroris yang diamankan atau ditangkap oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan selama periode 4 tahun terakhir ini di wilayah Kabupaten Bekasi. Sepanjang 4 (empat) tahun terakhir tersebut, terdapat 8 (delapan) kasus peristiwa penangkapan anggota kelompok teroris di wilayah Kabupaten Bekasi dengan 25 orang terduga anggota kelompok teroris. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bekasi menjadi wilayah transit para terduga teroris.

Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya adalah bahwa Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang strategis dengan kepadatan penduduk yang tinggi yang mayoritas bekerja sebagai buruh (Bachtiar, 2019). Dengan adanya penangkapan-penangkapan terduga teroris yang sudah

berulang kali terjadi di Kabupaten Bekasi telah memunculkan pertanyaan yang kritis yaitu “mengapa terduga teroris senang tinggal di Bekasi sebelum mereka beraksi yang dalam istilah lain disebut sebagai “daerah penyelaman”? Atau pertanyaan lainnya, “mengapa bukan di kota Tangerang, Depok atau Bogor menjadi daerah penyelaman kelompok teroris yang juga merupakan wilayah penyangga ibukota Jakarta lainnya?”

Mencermati kasus-kasus tersebut maka terdapat relevansi yang sangat erat dengan “kesadaran bela negara” yang dimiliki oleh warga negara di wilayah kabupaten Bekasi. Masalah kriminalitas memiliki relevansi dengan kesadaran bela negara, yakni mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, serta mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bersih. Selain itu, permasalahan tersebut juga berkaitan dengan adanya sikap menantang keberadaan ideologi negara yang berdasarkan Pancasila. Permasalahan ini merupakan bentuk sikap warga negara yang tidak mencerminkan nilai-nilai Bela Negara salah satunya yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara (Peraturan Menhan RI No. 32 Tahun 2016).

Membina warga negara Indonesia untuk memiliki kesadaran bela negara membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Yang dimaksud dengan warga negara tersebut

ialah masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini ialah warga yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bekasi sudah cukup lama dilaksanakan kebijakan pembinaan kesadaran bela negara terhadap warga negara agar terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran bela negara. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah “sejauh mana keberhasilan pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan terkait di kota Bekasi selama ini?”

Agar pertanyaan di atas dapat terjawab, maka diperlukan penelitian terkait dengan evaluasi pembinaan kesadaran bela negara di Kabupaten Bekasi, mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan kesadaran bela negara, serta bagaimana solusi yang diperlukan juga merupakan bagian dari rancangan strategi guna mewujudkan keberhasilan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi.

Membangun masyarakat yang memiliki sikap Bela Negara dan cinta tanah air merupakan salah satu sasaran strategis pertahanan negara. Hal ini penting apabila dihadapkan dengan kondisi bangsa saat ini terutama dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter pada hakekatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter. Ancaman nirmiliter dapat berasal dari

luar negeri atau dapat pula bersumber dari dalam negeri. Ancaman nirmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideology, politik, ekonomi, sosial, informasi, teknologi dan keselamatan umum (Peraturan Menhan RI No. 25 Tahun 2014)

Metode Penelitian

Proses penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi yakni suatu proses untuk mengetahui seberapa efisien perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh dilapangan berupa kata-kata dan gambar lalu dijabarkan secara deskriptif (Moleong, 2004).

Bentuk penelitian adalah pendekatan studi kasus dimana adanya pemanfaatan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyelaman atau sebagai tempat transit kelompok teroris. Dengan demikian, lokasi penelitian hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari para pihak yang dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah:

(1) Bagaimana pembinaan kesadaran Bela Negara sebagai sasaran strategis

pertahanan negara dapat terimplementasi dalam menghadapi ancaman nirmiliter di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan sub-sub objek :

(a) Evaluasi perencanaan pembinaan mewujudkan salah satu strategi pertahanan yaitu kesadaran bela negara menghadapi ancaman nirmiliter di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

(b) Evaluasi persiapan pembinaan mewujudkan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

(c) Evaluasi pelaksanaan pembinaan mewujudkan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; dan

(d) Evaluasi hasil pembinaan mewujudkan salah satu sasaran strategi pertahanan, yakni kesadaran bela negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

(2) objek penelitian selanjutnya adalah apa kendala implementasi pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?; dan

(3) objek penelitian yang ketiga adalah bagaimana strategi implementasi dari pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya penangkalan ancaman nirmiliter di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat?

Sumber data primer berasal dari pemangku kepentingan yang terkait dalam penelitian ini di Kementerian Pertahanan RI cq Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan) dan Direktorat Bela Negara; pejabat terkait di jajaran Kabupaten Bekasi; pejabat terkait di jajaran Komando Resort Militer (Korem) di Bekasi; pejabat terkait di jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di Bekasi; pejabat terkait di jajaran Polisi Resort (Polres) Metro Bekasi, pejabat terkait di jajaran Kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi; pejabat terkait di jajaran Komando Rayon Militer (Koramil)-Kodim Bekasi, pejabat terkait di jajaran Polisi Sektor (Polsek) - Polres Metro Bekasi, pejabat terkait di jajaran Kantor Kelurahan di wilayah Kabupaten Bekasi; perwakilan guru, mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Bekasi; perwakilan masyarakat yang dianggap relevan menjadi sumber data antara lain tokoh-tokoh yang terdiri dari para tokoh masyarakat seperti agama, adat, masyarakat, pemuda, dan kelompok masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen dan catatan serta foto-foto yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi literatur atau dokumen (Creswell & Creswell, 2017). CIPP (*context, input, process, product*) merupakan model evaluasi data yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi pembinaan

kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Model ini dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (2007).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data angket, wawancara, observasi dan studi literatur disampaikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Implementasi salah satu sasaran strategis pertahanan negara, yakni pembinaan kesadaran bela negara untuk menghadapi ancaman nirmiliter di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil sebagai berikut:

- (a) Tahap “*context*”. Tahap ini merupakan tahap Perencanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Guna Menghadapi Ancaman Nirmiliter Di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Pada tahap ini yang menjadi fokus peneliti adalah tentang kesesuaian dalam merumuskan bagaimana tujuan dan sasaran pembinaan kesadaran bela negara tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan strategi pertahanan negara. Berdasarkan hasil angket, mayoritas (80%) menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara perumusan tujuan, dan sasaran pembinaan kesadaran bela negara

dengan kebutuhan strategi pertahanan negara. Sedangkan sisa pendapat lainnya mengatakan belum sesuai atau tidak tahu apakah sudah sesuai atau belum. Dilain pihak, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur dalam tahap perencanaan ini didapatkan hasil yang berbeda yaitu bahwa perumusan tujuan dan sasaran pembinaan kesadaran Bela Negara tidak jelas dalam mendukung kebutuhan sasaran strategi pertahanan negara;

(b) Tahap “*input*”. Tahap ini merupakan tahap Persiapan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Guna Menghadapi Ancaman Nirmiliter Di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Tahapan ini fokus meneliti tentang sejauh mana prosedur, struktur organisasi, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, serta anggaran mampu menjadi pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan pada tahapan perencanaan. Berdasarkan hasil angket, mayoritas (70%) menyatakan bahwa prosedur, struktur organisasi, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, serta anggaran mampu menjadi pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan pada tahapan perencanaan. Sedangkan

sisa pendapat lainnya mengatakan belum dapat mendukung atau tidak tahu apakah dapat mendukung atau tidak. Dilain pihak, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur dalam tahap persiapan ini didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan hasil angket tersebut di atas. Hasil dari teknik pengumpulan data ini menunjukkan bahwa prosedur, struktur organisasi, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, serta anggaran mengatakan sama sekali tidak jelas apakah akan dapat atau tidak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan pada tahapan perencanaan;

(c) Tahap “*process*”. Tahap ini merupakan tahap Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Tahapan ini fokus meneliti tentang bagaimana pelaksanaan prosedur, struktur organisasi, dukungan sumberdaya, sarana-prasarana, serta anggaran apakah berjalan sesuai tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam tahap perencanaan. Berdasarkan hasil angket, mayoritas (70%) pendapat menyatakan bahwa implementasi prosedur, struktur organisasi, sumberdaya manusia,

sarana-prasarana, serta anggaran berjalan lancar dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan pada tahapan perencanaan. Sedangkan sisa pendapat lainnya mengatakan bahwa implementasi tidak berjalan lancar atau tidak tahu apakah berjalan lancar atau tidak. Dilain pihak, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur dalam tahap pelaksanaan ini didapatkan hasil yang tidak sinkron dengan hasil angket tersebut di atas. Menurut informasi hasil dari teknik pengumpulan data ini dinyatakan bahwa implementasi prosedur, struktur organisasi, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, serta anggaran mengatakan implementasi tidak berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan pada tahapan pelaksanaan ini;

- (d) Tahap “*product*”. Tahap ini merupakan tahap Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Tahapan ini fokus meneliti tentang keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesadaran bela negara sebagaimana yang ditetapkan dalam tahapan

perencanaan. Berdasarkan hasil angket, mayoritas (80%) sumber informasi menyatakan bahwa tujuan dan sasaran telah berhasil dicapai pada pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran bela negara sebagaimana yang ditetapkan dalam tahapan perencanaan. Sedangkan sisa pendapat lainnya mengatakan tidak berhasil atau tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Dilain pihak, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur dalam tahap hasil pelaksanaan ini didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan hasil angket tersebut di atas yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran guna meningkatkan kesadaran bela negara sebagaimana yang ditetapkan dalam tahapan perencanaan;

- (2) Kendala Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter di Wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil sebagai berikut:

- (a) Tahap “*context*”. Dalam tahap ini yang merupakan tahap perencanaan pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Pada

tahap ini, tidak ada sosialisasi bela negara dalam 4 tahun terakhir ini di Kabupaten Bekasi. Jika ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) tidak melibatkan personel dari Pusat Pendidikan Latihan (Pusdiklat) Bela Negara sebagai supervisi. Program Bela Negara yang diselenggarakan menumpang dengan kegiatan Program Teritorial dari Staf Teritorial TNI-AD (Sterad) di wilayah Korem 051/WKT. Program tentang pembinaan kesadaran bela negara Kemhan cq. Ditjen Pothan tidak diberikan langsung kepada pelaksana-pelaksana di lapangan, seperti Korem, Kodim atau Koramil setempat. Tidak ada kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara secara rutin yang bersifat wajib. Dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara tidak ada regulasi/bahan pembelajaran/kurikulum. Selama ini berpatokan kepada kegiatan Staf Teritorial TNI-AD (Sterad) yaitu dalam pembinaan komunikasi sosial (Binkomsos), pembinaan teritorial (Binter) dan wawasan kebangsaan (Wasbang);

(b) Tahap “input”. Tahap ini yang merupakan tahap persiapan pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa

Barat. Pada tahap ini, sosialisasi kurikulum tentang Bela Negara tidak sampai ke tingkat satuan bawah. Tidak melibatkan personel Pusdiklat Bela Negara sebagai supervisi dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di daerah. Di lingkup sekolah, pemateri/pelatih dilakukan oleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang berdomisili dekat dengan sekolah yang bersangkutan. Kegiatan pembinaan tidak rutin dilaksanakan apalagi dengan adanya wabah Covid-19. Terdapat keterbatasan pelatih/pengajar Bela Negara yang pada umumnya hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Belum ada peta jalan (*roadmap*) tentang apa, siapa, bagaimana, kapan, untuk apa, belum jelas. Persiapan pembinaan kesadaran bela negara hanya didasarkan kepada aturan yang ada di Sterad terkait sejalan dengan pembinaan komunikasi social (Binkomsos) pembinaan teritorial (Binter) dan wawasan kebangsaan (Wasbang);

(c) Tahap “process”. Tahap ini yang merupakan tahap pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Pada tahap ini, program sosialisasi Bela

Negara hanya diselipkan dalam program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan oleh satuan-satuan di jajaran Mabes TNI/Angkatan artinya sosialisasi diberikan jika ada saat-saat luang dalam kegiatan TMMD. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Pothan tidak melibatkan personel Pusdiklat Bela Negara sebagai supervisi. Ditjen Pothan melaksanakan sosialisasi dengan personel yang belum pernah dididik atau mendapatkan materi di Pusdiklat. Sebagai Pusdiklat Bela Negara tidak dapat memberikan masukan kepada para pelaksana kegiatan bela negara di tingkat bawah. Masa Covid-19 membatasi kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan cara online/virtual untuk di sekolah-sekolah, dengan hanya durasi 1 – 1,5 jam, yang biasanya dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara tidak bisa dilakukan karena program TMMD tidak selalu ada di wilayah Korem 051/WKT sehingga tidak bisa dilakukan. Adanya kendala pada anggaran, sehingga menyebabkan pelatihan materi Bela Negara ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun;

(d) Tahap “*product*”. Tahap ini yang merupakan hasil pembinaan

kesadaran bela negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Pada tahap ini, akibat tidak adanya sosialisasi termasuk kurikulum tentang pelaksanaan Bela Negara sampai ke tingkat bawah (Korem/Kodim/Koramil) akibatnya hasil kegiatan jika ada tidak maksimal. Selanjutnya, akibat pelaksanaan kegiatan Bela Negara oleh instansi pelaksana dimana tidak memiliki para pelatih yang tidak kompeten melatih mengakibatkan hasil kegiatan tidak optimal. Dengan tidak adanya keterlibatan Pusdiklat Bela Negara sebagai supervisi untuk memonitor pelaksanaan kegiatan tidak dapat dicapai sesuai yang ditetapkan. Akibat penyegaran kesadaran bela negara yang hanya dilakukan setahun sekali dimana waktu kegiatan pelaksanaan sangat singkat, sehingga tidak banyak menjangkau warga mengikuti kegiatan kesadaran bela negara, maka kegiatan sebagaimana di atas hasilnya tidak optimal. Akibat pembinaan kesadaran bela negara terhadap para karyawan perusahaan/pabrik tertentu yang ada di sekitar Korem 051/ WKT hanya diberikan kepada Satuan Pengamanan dalam waktu singkat maka hasil kegiatan juga terbatas.

(3) Strategi Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Menangkal Ancaman Nirmiliter Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil sebagai berikut:

- (a) Elemen Tujuan. Dalam perumusan tujuan akan dilaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara oleh pemangku kepentingan terkait yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, secara umum tidak menyampaikan terlebih dahulu hal-hal apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembinaan kesadaran bela negara kepada warga negara yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Selain itu, para pemangku kepentingan dalam merumuskan tujuan yang akan melakukan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi, juga tidak mendapatkan masukan atau tidak meminta masukan dari warga negara yang akan mengikuti kegiatan tersebut di wilayah Kabupaten Bekasi;
- (b) Elemen Cara. Dalam melakukan pembinaan kesadaran Bela Negara bagi warga di wilayah Kabupaten Bekasi tidak menggunakan pedoman berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemangku kepentingan dalam pembuat kurikulum. Dengan demikian, cara yang dilakukan dalam

kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi warga negara di wilayah Kabupaten Bekasi hanya diikuti berdasarkan program-program yang dilakukan oleh satuan teritorial setempat sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara tidak berdasarkan pada buku panduan pembinaan kesadaran bela negara yang telah berlaku secara umum;

- (c) Elemen Sarana. Dukungan sarana pada pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan pedoman kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Mengingat kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi hanya bersifat menumpang pada program-program yang dilakukan oleh Satuan Teritorial setempat maka dukungan sarana juga tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara yang didasarkan kepada panduan pembinaan kesadaran bela negara yang berlaku secara umum.

Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh di atas dihubungkan dengan hasil penelitian terdahulu, serta teori-teori yang relevan

maka dapat diberikan analisa sebagai berikut:

(1) Implementasi dari salah satu sasaran strategis pertahanan negara yaitu pembinaan kesadaran Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Nirmiliter Khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat:

(a) Berkaitan dengan “perencanaan”, menurut teori evaluasi oleh Daniel Stufflebeam bahwa kegiatan dalam tahap pertama yaitu “evaluasi context” adalah mengevaluasi kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Dengan demikian, yang dimaksudkan dalam tahap evaluasi konteks ini adalah tentang perencanaan. Dalam penelitian ini, kesesuaian perencanaan pembinaan kesadaran bela negara tidak didasarkan dengan “apa yang perlu dilakukan” dan juga tidak mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Penilaian tersebut diperkuat oleh data-data misalnya tidak pernah ada sosialisasi bela negara dalam 4 tahun terakhir ini di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, perencanaan kegiatan program Bela Negara tidak dibuat secara khusus, tapi hanya ikut dengan kegiatan program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Staf Teritorial TNI-

AD (Sterad) di wilayah Korem 051/WKT. Mengingat bahwa tidak ada kegiatan pembinaan kesadaran bela negara secara rutin maka perencanaan juga tidak dilakukan dengan baik. Berkaitan dengan belum adanya pedoman pembinaan kesadaran bela negara selama ini maka berdampak pula kepada perencanaan yang baik. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori strategi khususnya elemen “tujuan” maka dalam perencanaan pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat juga tidak melalui suatu proses perumusan tujuan sesuai dengan kaidah evaluasi konteks. Misalnya, dalam perumusan tidak meminta masukan-masukan dari warga setempat atau pemangku kepentingan terlebih dahulu termasuk juga tidak menjelaskan kepada warga tentang apa yang menjadi tujuan dilakukannya kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Kalaupun jawaban kuesioner pada tahap perencanaan, mayoritas responden mengatakan bahwa perencanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan baik, akan tetapi jawaban tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi

faktual tentang perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian, tahap perencanaan dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi sebagaimana yang dikaidahkan dalam teori evaluasi dan juga dalam teori strategi;

- (b) Berkaitan dengan “persiapan”, sesuai teori Daniel Stufflebeam dalam teori evaluasi mengatakan bahwa kegiatan dalam tahap “evaluasi input” ini adalah mengidentifikasi dan mencari tahu permasalahan, kebutuhan terhadap anggaran, dan aset untuk kelayakan serta potensi efektivitas biaya untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Artinya, evaluasi ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk mewujudkan perencanaan yang sudah dibuat dalam tahap evaluasi konteks (perencanaan). Dalam penelitian ini, persiapan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara juga tidak didasarkan sesuai dengan hasil identifikasi dan permasalahan serta tidak sesuai dengan kebutuhan aset dan anggaran untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Penilaian tersebut di atas didasarkan kepada data pendukung lainnya misalnya

tidak adanya sosialisasi kurikulum tentang bela negara sampai ke tingkat bawah satuan pelaksana bawah seperti Kodim dan Koramil tentunya hal ini mengakibatkan persiapan tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, pemateri/pelatih kesadaran bela negara yang bertugas ke sekolah-sekolah adalah para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dinilai tidak melakukan persiapan kegiatan kesadaran bela negara dengan optimal mengingat keterbatasan mereka sebagai pelatih/pengajar bela negara yang hanya berlatar belakang pendidikan setingkat SMA. Dengan belum adanya kegiatan rutin dan peta jalan (*roadmap*) tentang pembinaan kesadaran bela negara juga mengakibatkan persiapan kegiatan tidak bisa optimal. Kemudian, berdasarkan teori strategi jika dikaitkan dengan persiapan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan baik dalam elemen “tujuan”, “cara” maupun “sarana” juga tidak terpenuhi. Penilaian ini didasarkan kepada kondisi faktual misalnya tidak adanya proses perumusan tujuan secara jelas maka akibatnya juga berpengaruh terhadap persiapan baik dalam cara maupun sarana yang diperlukan dalam rangka

pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Memang, berdasarkan jawaban kuesioner pada tahap persiapan ini, mayoritas responden mengatakan bahwa persiapan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, kondisi faktual tidak menggambarkan sebenarnya yang ada di lapangan tentang persiapan yang dilakukan. Dengan demikian, maka persiapan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori evaluasi khususnya dalam evaluasi masukan termasuk dalam teori strategi tentang cara dan sarana yang dibutuhkan guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat;

- (c) Berkaitan dengan “pelaksanaan”, berdasarkan teori Daniel Stufflebeam dalam evaluasi mengatakan bahwa kegiatan dalam tahapan “evaluasi process” ini adalah upaya untuk memahami pelaksanaan dari setiap perencanaan dalam rangka membantu para staf untuk menyelesaikan aktivitas dan kelompok pemakai yang lebih

luas untuk memberikan penilaian program dan menginterpretasikan manfaat. Dengan demikian, evaluasi proses ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan persiapan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara juga tidak sepenuhnya berdasarkan perencanaan maupun persiapan dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Penilaian ini didasarkan kepada kondisi faktual di lapangan misalnya kegiatan sosialisasi Bela Negara hanya diselipkan pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan oleh satuan-satuan teritorial di daerah. Artinya pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara hanya dilakukan jika ada waktu luang dalam kegiatan TMMD tersebut. Hal ini semakin diperburuk lagi mengingat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak selalu ada di wilayah Korem 051/WKT serta belum adanya peta jalan tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara di wilayah teritorial Kabupaten

Bekasi. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara hanya dilakukan dari personel-personel yang belum pernah dididik atau mendapatkan materi di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat), maka pelaksanaan kegiatan kesadaran bela negara tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Dalam keadaan ancaman wabah virus COVID-19 saat ini mengakibatkan pembatasan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara maka pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara juga tidak optimal. Memang, jawaban kuesioner pada tahap pelaksanaan ini mayoritas responden mengatakan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik, namun kondisi faktual tidak menggambarkan sebagaimana yang ada di lapangan. Selain itu, ditinjau dari teori strategi maka pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara yang dilakukan baik dalam elemen tujuan, cara maupun sarana juga tidak terpenuhi. Penilaian ini didasarkan kepada kondisi faktual pada tahapan perencanaan dan persiapan yang tidak memiliki tujuan, cara dan sarana yang jelas dalam rangka pembinaan

kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Merujuk kepada penjelasan tersebut di atas, maka pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori evaluasi khususnya dalam evaluasi proses maupun dalam teori strategi guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat tidak terlaksana secara baik; dan

- (d) Berkaitan dengan “hasil” pelaksanaan, merujuk kepada teori evaluasi Daniel Stufflebeam khususnya dalam tahap “evaluasi produk” adalah tahap melakukan identifikasi dan mengakses keluaran serta manfaat baik yang telah direncanakan maupun yang tidak untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Artinya, evaluasi produk ini merupakan pelaksanaan dari tahap pelaksanaan (evaluasi proses), tahap persiapan (evaluasi input) dan tahap perencanaan (evaluasi konteks). Dalam penelitian ini, hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara masih jauh dari yang diharapkan sesuai dengan teori evaluasi produk yaitu “apakah kegiatan sudah berhasil” dalam rangka mendukung kegiatan

pembinaan kesadaran bela negara guna menghadapi ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat. Penilaian tersebut didasarkan kepada kondisi aktual misalnya masih adanya kecenderungan meningkatnya kasus-kasus kriminalitas, kasus kecelakaan lalu lintas; kasus pelanggaran lalu lintas; dan masih adanya kasus penangkapan-penangkapan anggota kelompok teroris di wilayah Kabupaten Bekasi hingga akhir-akhir ini. Memang dalam jawaban kuesioner, mayoritas responden mengatakan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi berhasil dengan baik. Namun, hasil kuesioner tersebut tidak menggambarkan kondisi faktual yang ada di lapangan tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Merujuk kepada hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam teori evaluasi khususnya dalam evaluasi produk belum sepenuhnya didasarkan kepada “apakah kegiatan sudah berhasil” sesuai dengan sasaran. Demikian pula, mengacu kepada teori strategi dalam tahap hasil pelaksanaan kegiatan guna menghadapi

ancaman nirmiliter di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat juga tidak terpenuhi baik dalam elemen tujuan, cara maupun sarana.

(2) Berbagai hambatan selama kegiatan di Wilayah Kabupaten Bekasi. Analisa terhadap masalah tersebut di atas adalah bahwa kegiatan pembinaan kesadaran bela negara belum dijadikan sebagai perhatian yang penting dari semua pihak. Penilaian tersebut di atas dapat dilihat dari kondisi faktual, misalnya dalam “tahap perencanaan” pembinaan kesadaran bela negara, tidak ada sosialisasi bela negara dalam 4 tahun terakhir ini di Kabupaten Bekasi. Tidak ada kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara secara rutin yang bersifat wajib. Tidak ada Regulasi/Bahan Pembelajaran/Kurikulum dalam kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara. Dalam hal yang sama pada “tahap persiapan” pembinaan kesadaran bela negara, sosialisasi kurikulum tentang bela negara tidak sampai ke tingkat satuan bawah. Tidak melibatkan personel Pusdiklat Bela Negara sebagai supervisi dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di daerah. Pemateri/pelatih hanya dilakukan oleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang pada umumnya hanya berlatar belakang pendidikan SMA. Belum ada peta jalan (*roadmap*) pembinaan kesadaran bela negara. Demikian pula dalam “tahap pelaksanaan” pembinaan kesadaran bela negara, program sosialisasi Bela

Negara hanya diselipkan dalam setiap program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan oleh satuan-satuan di jajaran Mabes TNI, artinya sosialisasi diberikan jika ada saat-saat luang dalam kegiatan TMMD. Masa Covid-19 membatasi kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan cara online/virtual untuk sekolah-sekolah dengan durasi hanya 1–1,5 jam. Program TMMD tidak selalu ada di wilayah Korem 051/WKT sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara secara rutin setiap tahun. Sama halnya pada “tahap hasil pelaksanaan”, pembinaan kesadaran Bela Negara dengan penyegaran kesadaran Bela Negara juga hanya dilakukan setahun sekali dimana waktu kegiatan pelaksanaan sangat singkat, hanya dilaksanakan selama satu hari dengan durasi empat jam. Dengan demikian, tidak banyak menjangkau warga mengikuti kegiatan kesadaran bela negara maka kegiatan sebagaimana di atas hasilnya tidak optimal. Akibatnya, kepatuhan hukum dan disiplin berlalu lintas masih rendah serta kejadian kriminalitas cenderung meningkat;

(3) Strategi pembinaan kesadaran Bela Negara dalam rangka menangkal ancaman nirmiliter di Wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Analisa terhadap masalah tersebut di atas adalah bahwa kegiatan pembinaan kesadaran bela negara tidak berdasarkan strategi

yang dirumuskan secara tepat. Penilaian tersebut di atas berdasarkan kondisi faktual, misalnya dalam perumusan “tujuan” dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bekasi, tidak mendapatkan masukan atau tidak meminta masukan dari warga negara atau pemangku kepentingan terkait yang mengikuti kegiatan pembinaan ini. Dengan tidak adanya masukan dari pemangku kepentingan terkait atau dari peserta kegiatan mengakibatkan strategi yang ditetapkan menjadi tidak akurat. Selanjutnya, dengan banyaknya kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi warga negara di wilayah Kabupaten Bekasi baik dalam tahap perencanaan, persiapan maupun dalam pelaksanaan sedikit-banyaknya memengaruhi strategi yang ditetapkan. Perumusan strategi yang tepat perlu diawali dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bela Negara selama ini yang pernah dilakukan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta menyusun strategi yang tepat agar pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara bagi warga negara di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menangkal berbagai ancaman yang berdimensi nirmiliter sekaligus untuk melaksanakan amanat konstitusi UUD

RI Tahun 1945, UU RI No. 3 Tahun 2004 tentang Pertahanan Negara dan UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan negara.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Hasil evaluasi terhadap implementasi pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara tidak berjalan dengan baik serta tidak memenuhi persyaratan tentang hal-hal yang harus dipenuhi mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan tahap hasil pelaksanaan;

Adapun hambatan yang dihadapi adalah bahwa pembinaan kesadaran bela negara belum dijadikan sebagai sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak terutama pemangku kepentingan terkait. Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara warga negara hanya merupakan kegiatan sampingan jika ada peluang dengan kata lain bukan kegiatan prioritas.

Belum terdapat strategi pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka menangkal ancaman nirmiliter di wilayah teritorial Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Oleh sebab itu, perlu

dirumuskan strategi yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi baik dari aspek geografis, demografis serta dinamika kondisi sosial kehidupan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan hasil kegiatan pembinaan kesadaran bela negara guna menangkal ancaman nirmiliter di wilayah Kabupaten Bekasi, maka strategi yang perlu dijalankan adalah sebagai berikut:

- (1) Aspek Tujuan (Goals):
 - (a) Sebelum merumuskan tujuan maka perlu disampaikan terlebih dahulu tentang apa yang menjadi tujuan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara kepada warga negara yang berdomisili di Kabupaten Bekasi oleh para pemangku kepentingan ;
 - (b) Dalam merumuskan tujuan tentang kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, perlu mendapatkan masukan atau meminta masukan dari warga negara yang akan mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Bekasi.
- (2) Aspek Cara (Ways):
 - (a) Perencanaan kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara perlu mengacu kepada kurikulum yang dibuat oleh pemangku terkait;

- (b) Perencanaan program perlu dibuat secara mandiri dengan kata lain tidak menumpang dengan pembinaan kegiatan satuan teritorial setempat;
- (c) Perencanaan program langsung diberikan kepada satuan-satuan pelaksana di lapangan seperti Korem atau Kodim untuk mempercepat dan mengoptimalkan hasil pembinaan kesadaran bela negara;
- (d) Perencanaan program perlu dilakukan secara rutin dan wajib melalui peta jalan (*roadmap*) yang sudah ditetapkan;
- (e) Persiapan program pembinaan kesadaran bela negara dalam hal kebutuhan tenaga pelatih perlu mempersiapkan para pelatih yang telah mendapatkan pelatihan dari Pusdiklat Bela Negara;
- (f) Persiapan program perlu mendapatkan supervisi khususnya bagi satuan-satuan pelaksana di tingkat bawah;
- (g) Persiapan program hendaknya berdasarkan modul kurikulum bela negara ataupun peta jalan yang sudah ditetapkan oleh satuan-satuan pelaksana di tingkat bawah;
- (h) Pelaksanaan program pembinaan kesadaran bela negara hendaknya

berdasarkan program tersendiri secara rutin yang direncanakan secara tersendiri.

(3) Aspek Sarana (Means):

- (a) Untuk meningkatkan hasil pelaksanaan program pembinaan kesadaran bela negara perlu dialokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan atau program pembinaan kesadaran Bela Negara.
- (b) Perlu diperbanyak penyegaran-penyegaran kesadaran bela negara paling tidak 3 kali dalam setahun; serta
- (c) Program pembinaan kesadaran bela negara hendaknya berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Pusdiklat Bela Negara dengan pelibatan para pelatih yang sudah mendapatkan pelatihan dari Pusdiklat Bela Negara.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Y. (2019). Jumlah Kasus Kejahatan di Kabupaten Bekasi Meningkat Selama 2019. <https://jakarta.tribunnews.com/2019/12/31/jumlah-kasus-kejahatan-di-kabupaten-bekasi-meningkat-selama-2019>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://bekasikab.bps.go.id/>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications. <https://www.academia.edu/download/31210858/MGMT-612.pdf>.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Stufflebeam, Daniel L dan Shinkfield, Anthony J. (2007). *Evaluation Theory, Models & Applications*. San Francisco: Jossey Bass.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

